

Penerapan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Sudah Sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Kantor Camat Batui Kabupaten Banggai

Implementation of the Presentation of the Budget Realization Report in accordance with PP No. 71 of 2010 at the Batui Sub-district Office, Banggai Regency

Fitriani

Universitas Muhammadiyah Luwuk

^(*)Email Korespondensi: nengfitry6@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan penyajian laporan realisasi anggaran sudah sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Kantor Camat Batui Kabupaten Banggai. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, data di peroleh dari wawancara dan studi lapangan., Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Kabupaten Banggai. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa data laporan keuangan dan realisasi anggaran di Kecamatan Batui sudah mencapai target yang telah disepakati serta mengalami peningkatan dari anggaran yang telah ditetapkan, Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh SKPD Kecamatan Batui menyajikan Laporan yang sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dimana biaya yang ditampilkan dalam LRA adalah Pendapatan, Belanja, transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto dan SiLPA/SiKPA.

Kata Kunci: Laporan Realisasi Anggaran

Abstract

This study aims to determine whether the implementation of the presentation of the budget realization report is in accordance with PP No. 71 of 2010 at the Batui District Office of Banggai Regency. Analysis of the data used in this study using descriptive analysis, data obtained from interviews and field studies. This research was carried out at the Banggai District Head Office. Based on the results of the research, it can be seen that the financial report data and budget realization in Batui District have reached the agreed target and have increased from the budget that has been set, the Budget Realization Report presented by the Batui District SKPD presents a report that is in accordance with Government Regulation No. The costs displayed in the LRA are Income, Expenditures, transfers, surplus/deficit, financing receipts, financing expenditures, net financing and SiLPA/SiKPA.

Keywords: Budget Realization Report

PENDAHULUAN

Setiap Negara memiliki standar akuntansi sebagai acuan dalam pembuatan laporan keuangan. Sesuai undang-undang yaitu Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, setelah mengalami proses yang panjang, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah lama dinantikan oleh berbagai pihak telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP) dan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP No.24 Tahun 2005.

Setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut Good Governance. Good Governance merupakan suatu bentuk keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sebagaimana yang mereka kehendaki. Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diterapkan konsep Good Government Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. *Good Government Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Marini & Marina, 2019).

Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (Agustini, 2011).

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan

negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintah. Penyusunan laporan keuangan (Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, 2017) Sedangkan pengertian laporan keuangan (Harahap, 2015) Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Menurut (Kuswandi, 2016) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Abdul Halim, 2012) menyatakan bahwa Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu penyusunannya harus mengacu pada PSAP. Penerapan PSAP harus dilaksanakan agar ada kesamaan akuntansi di semua pemerintahan wilayah Indonesia, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Utomo, 2016) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa Laporan realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang disebut SIMDA. Penyajian laporan realisasi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum secara keseluruhan telah sesuai dengan PSAP No. 2, dengan menyajikan struktur laporan

realisasi anggaran, periode pelaporan, dan isi laporan realisasi anggaran.

Penelitian yang dilakukan (Fitria Ayu Lestari, Niu Herman Karamoy, 2014) tentang Analisis Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Mobagu menunjukkan bahwa DPPKAD Kota Kotamobagu belum menerapkan PP No.71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005. SAP berbasis kas menuju akrual, menyajikan 2 laporan keuangan yaitu neraca dan laporan realisasi anggaran sedangkan SAP berbasis akrual menyajikan 6 laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga diharapkan pada tahun selanjutnya, DPPKAD Kota Kotamobagu telah menerapkan PP No.71 Tahun 2010 dan mengadakan sosialisasi serta bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Paidi, 2019) Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi kasus Pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan) menunjukkan bahwa secara keseluruhan penyajian laporan realisasi anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual telah dinilai baik. Namun dalam penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran Kantor Kepala Desa Amplas

tidak menyajikan pos-pos transfer, tidak menyajikan pos-pos pengeluaran pembiayaan, tidak melakukan pemindahan saldo lebih/kurang anggaran ke laporan perubahan saldo anggaran, tidak transaksi mata uang asing ke mata uang rupiah dan tidak menyusun laporan neraca berbasis akrual yang diatur dalam PSAP Nomor 02 PP Nomor 71 tahun 2010.

Penerapan PSAP No.02 tentang Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang memerintahkan untuk memeriksa apakah laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, serta tepat waktu.

METODE

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan aturan-aturan yang sesuai dengan pendekatan penelitian. Analisis data ini dilakukan dengan tujuan dalam rangka penarikan kesimpulan. Analisis data digunakan secara deskriptif. Yaitu Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Kecamatan Batui Kabupaten Banggai.

HASIL

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Batui

Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah			
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	-	-	-
Yang Dipisahkan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	-
Total Pendapatan			
Belanja Operasi :			
Belanja Pegawai	Rp. 114.680.000	Rp. 113.640.000	Rp. 1.040.000
Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 389.679.400	Rp. 321.650.400	Rp. 68.029.000
Total Belanja Operasi	Rp. 504.359.000	Rp. 435.290.000	Rp. 69.069.000

Belanja Modal :			
Peralatan & Mesin	Rp. 130.899.400	Rp. 128.495.350	Rp. 2.404.050
Gedung & Bangunan	Rp. 525.941.300	Rp. 520.580.000	Rp. 5.361.300
Aset Tetap Lainnya	Rp. 189.650.500	Rp. 201.400.000	Rp. 11.749.500
Total Belanja Modal	Rp. 846.491.200	Rp. 850.475.350	Rp. 19.514.850
Total Belanja	Rp.1.350.850.200	Rp. 1.285.765.000	Rp. 88.583.850

Sumber : Kecamatan Batui, 2017

Laporan Realisasi Anggaran Pada Kecamatan Batui hanya terdapat kegiatan belanja saja yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang termasuk dalam kategori belanja operasi sedangkan belanja modal terdiri dari peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya, karena SKPD Kecamatan Batui tidak memungut Pendapatan Asli Daerah. Laporan Realisasi Anggaran SKPD sebaiknya menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu (PSAP no.2). dalam pengertian kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.

Informasi ini dapat dianalisis dengan melihat (a) selisih antara anggaran dengan realisasinya; (b) rasio-rasio antar rekening, misalnya rasio total belanja terhadap pendapatan, belanja langsung terhadap belanja tidak langsung, belanja langsung terhadap total pendapatan, belanja langsung terhadap PAD dan sebagainya.

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran seharusnya terdiri dari : 1) Pendapatan, yaitu seperti Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Kekayaan Yang Dipisahkan dan Lain – Lain PAD yang sah. 2) Belanja, yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. 3) Transfer, yaitu seperti Dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana penyesuaian, pendapatan bagi hasil pajak, dan pendapatan bagi hasil lainnya. 4) Surplus/defisit LRA. 5) Pembiayaan, seperti penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Terlihat dari hasil penelitian dan data laporan keuangan dan realisasi Kecamatan

Batui sudah mencapai target yang telah disepakati serta mengalami peningkatan dari anggaran yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan terlihat cukup berhasil karena hampir mendekati presentase pencapaian atas realisasi tidak begitu jauh dari yang dianggarkan.

Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh SKPD Kecamatan Batui menyajikan Laporan yang sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dimana pos – pos yang ditampilkan dalam LRA adalah Pendapatan dan Belanja, yang setidaknya di miliki oleh Laporan Realisasi Anggaran, tanpa adanya pos transfer, surplus/defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto dan SiLPA/SiKPA.

Dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah daerah di pengaruhi oleh faktor – faktor pendukung diantaranya adalah :

Sumber Daya Manusia

Menurut (Hamali, 2016) Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan dan manajemen pengorganisasian tenaga kerja. Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan terutama laporan realisasi anggaran dibutuhkan sumber daya manusia atau pegawai untuk menjalankan perangkat pendukung yang dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sehubungan dengan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan program tersendiri, sangat dibutuhkan pegawai yang mengerti dengan baik dan dapat menjalankan secara benar program aplikasi tersebut.

Karena sistem aplikasi tersebut merupakan sistem yang baru, maka Pemerintah Daerah mempersiapkan pegawai melalui program pelatiba, modul pelatihan disusun oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara Departemen Keuangan RI dan setiap provinsi telah ada palikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pelatihan dilakukan kepada pegawai yang bekerja khusus dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut.

Jumlah pegawai yang diisyaratkan mengikuti pelatihan paling sedikit sesuai dengan jumlah komputer dengan aplikasi sistem Informasi Keuangan Daerah. Kemampuan pegawai untuk dapat memahami program aplikasi tersebut dan dapat menjalankannya dengan benar tergantung pada kualitas pegawai yang bersangkutan. Seorang pegawai akan lebih mudah dan cepat mengenal program aplikasi tersebut jika telah mengerti dasar-dasar pengoperasian komputer atau lebih mahir menggunakan aplikasi komputer.

Perangkat Pendukung

Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Kecamatan Batui, sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 Yaitu andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dilihat dari Penyajian Laporan Realisasi Anggaran telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, yaitu belanja diakui pada saat kas dikeluarkan. Dilihat dari pengukuran penyajian Laporan Realisasi Anggaran telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, yaitu menggunakan mata uang rupiah sebesar nominal kas yang dikeluarkan.

SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait Penerapan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Sesuai PP Nomor. 71 Tahun 2010. Selain itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya mampu mengangkat tema Perbedaan Penyajian Laporan Keuangan Antara PP 24 Tahun 2005 dan PP No 71 Tahun 2010, Sehingga dapat mendukung keakuratan dan kelengkapan hasil penelitian yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (keempat). salemba empat.
Agustini, F. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan*. Madenatera.
Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. (2017). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*. Ikatan Akuntan Indonesia.
Fitria Ayu Lestari, Niu Herman Karamoy, S.

telekomunikasi (Kadir, 2013) Teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer seperti printer, pembaca sidik jari, bahkan CD ROM, sedangkan teknologi telekomunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh (Kadir, 2013). Perangkat pendukung utama yang dibutuhkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau Laporan Realisasi Anggaran adalah perangkat pendukung teknis. Perangkat pendukung teknis adalah perangkat keras berupa komputer.

T. (2014). Analisis Penerapan PP. No 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mobagu. *EMBA*, 2, 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6461>

Hamali. (2016). *Pemahaman manajemen sumber daya manusia*. Center for Academic Publishing Service.

Harahap, S. S. (2015). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan* (1st–10th ed.). Rajawali Pers.

Kadir, A. dan T. C. T. (2013). *Pengantar Teknologi Informasi* (edisi Revi). CV. Andi Offset.

Kuswandi, A. (2016). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. UNISMA.

Marini, Y., & Marina, N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 1(1), 7–20. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v1i1.37>

Paidi. (2019). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan*. [UIN Sumatra Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/7864/>

Rajindra, Rajindra, Guasmin, G., & Burhanuddin, B. (2020). Financial Performance Analysis of Shares Returns in Cosmetics and Household Purposes Companies (Studies on companies listed on the Indonesian Stock Exchange). *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)*, 2(4), 196–204.

Rajindra, Rajindra, & Anggraeni, R. N. (2019). Costly Fees, Men's Participation in Family Planning Declines. *International*

Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS), 1(1), 5–8.
Utomo, R. dan C. E. (2016). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 05, 155–165.